

## Pengabdian Kepada Masyarakat Manajemen Risiko Hukum dalam Pengambilan Keputusan

Armansyah, Kristomos Daniel Halason Sihombing, Nabilla Rifda Nathania  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa, Jakarta, Indonesia

Email :

[armansyah@stih-adhyaksa.ac.id](mailto:armansyah@stih-adhyaksa.ac.id)  
[kristomos.daniel@stih-adhyaksa.ac.id](mailto:kristomos.daniel@stih-adhyaksa.ac.id)  
[nabilla.rifda@stih-adhyaksa.ac.id](mailto:nabilla.rifda@stih-adhyaksa.ac.id)

### Abstrak:

Manajemen risiko hukum dalam pengambilan keputusan adalah suatu hal yang sangat penting untuk menghindari masalah hukum yang bisa merugikan organisasi, pemerintah, atau individu. Tujuan dari program Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya manajemen risiko hukum dalam pengambilan keputusan, serta bagaimana cara mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko hukum tersebut. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan seminar, pelatihan interaktif, serta studi kasus yang berkaitan dengan risiko hukum dalam sektor publik dan swasta. Hasil dari pelaksanaan program ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta tentang konsep manajemen risiko hukum dan penerapannya dalam pengambilan keputusan. Peserta juga diberikan keterampilan praktis untuk mengelola risiko hukum dalam situasi nyata. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang lebih bertanggung jawab dan meminimalkan potensi sengketa hukum yang dapat muncul akibat keputusan yang tidak sesuai dengan hukum.

Kata kunci: manajemen risiko hukum, pengambilan keputusan, pengabdian masyarakat, risiko hukum, tata kelola pemerintahan.

### Abstract:

*Legal risk management in decision-making is very important to avoid legal problems that can harm organizations, governments, or individuals. The purpose of this community service program is to provide an understanding of the importance of legal risk management in decision-making, as well as how to identify, assess, and manage legal risks. In its implementation, this program involves seminars, interactive training, and case studies related to legal risks in the public and private sectors. The results of this program showed an increase in participants' understanding of the concept of legal risk management and its application in decision-making. Participants were also given practical skills to manage legal risks in real situations. This program is expected to improve the quality of more responsible decision-making and minimize potential legal disputes that could arise from decisions that are not in accordance with the law.*

*Keywords: legal risk management, decision-making, community service, legal risk, governance.*

## PENDAHULUAN

Pengambilan keputusan yang tepat dan strategis dalam berbagai sektor kehidupan, baik di sektor pemerintahan, organisasi, maupun dunia usaha, menjadi aspek krusial untuk keberhasilan dan keberlanjutan. Keputusan yang salah atau tidak mempertimbangkan faktor-faktor hukum berpotensi menimbulkan risiko hukum yang dapat merugikan individu atau organisasi, baik secara finansial, reputasi, maupun hukum. Di banyak negara, termasuk Indonesia, banyak pengambil keputusan yang kurang menyadari atau tidak sepenuhnya mempertimbangkan dampak hukum dari setiap kebijakan yang mereka ambil, baik di tingkat pemerintah maupun di sektor swasta. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem manajemen risiko hukum yang baik, terutama untuk memitigasi potensi masalah hukum yang dapat muncul akibat keputusan yang salah.

Manajemen risiko hukum adalah proses yang berfokus pada identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko hukum yang mungkin muncul dari keputusan yang diambil dalam sebuah organisasi atau pemerintahan. Risiko hukum ini bisa muncul dari kebijakan, regulasi, atau prosedur yang tidak memadai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di dunia usaha, pengelolaan risiko hukum penting dalam menghindari sengketa bisnis, penyalahgunaan kontrak, dan potensi kebangkrutan. Sementara di sektor pemerintahan, risiko hukum yang tidak dikelola dengan baik dapat berujung pada penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, atau bahkan permasalahan hukum yang mengarah pada sanksi administratif atau pidana.

Penting untuk dipahami bahwa manajemen risiko hukum bukan hanya tentang menghindari litigasi atau sengketa hukum, tetapi juga mencakup langkah-langkah preventif yang melibatkan analisis terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil, serta dampaknya terhadap regulasi yang berlaku. Salah satu prinsip penting dalam manajemen risiko hukum adalah penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). *Good governance* menuntut pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, dan berbasis pada hukum, sehingga kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan

dan memiliki dampak yang positif bagi masyarakat.

Indonesia sebagai negara berkembang dengan sistem pemerintahan yang kompleks, menghadapi sejumlah tantangan besar dalam mengelola risiko hukum dalam pengambilan keputusan. Salah satu tantangan utama adalah minimnya pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang manajemen risiko hukum di kalangan pejabat pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat secara umum. Ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap pentingnya manajemen risiko hukum sering kali mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga menambah potensi masalah hukum yang lebih besar.

Di sektor pemerintahan, pengambilan keputusan yang tidak mempertimbangkan aspek hukum dapat mengarah pada penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Banyak keputusan yang diambil oleh pejabat publik kurang melibatkan analisis hukum secara mendalam, yang dapat berakibat pada kebijakan yang merugikan masyarakat atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, terdapat juga masalah lain seperti ketidakjelasan prosedur, ketidaktahuan terhadap regulasi baru, serta ketidaktransparanan dalam proses pengambilan keputusan.

Di sektor swasta, pengabaian terhadap risiko hukum dapat menyebabkan sengketa bisnis, pelanggaran kontrak, atau kerugian finansial. Misalnya, pengambilan keputusan yang melibatkan investasi tanpa memperhatikan aspek hukum yang relevan bisa berujung pada kerugian besar atau bahkan kebangkrutan. Banyak perusahaan yang tidak memiliki sistem manajemen risiko yang cukup untuk memitigasi potensi sengketa yang muncul dari kebijakan internal atau hubungan dengan pihak ketiga.

Manajemen risiko hukum yang efektif sangat penting dalam menciptakan pengambilan keputusan yang akuntabel, adil, dan sesuai dengan hukum. Dengan meningkatnya

kesadaran terhadap pentingnya manajemen risiko hukum, diharapkan pengambil keputusan dapat lebih berhati-hati dan memperhitungkan aspek hukum dalam setiap kebijakan yang diambil. Langkah-langkah mitigasi risiko hukum yang baik, seperti penyusunan kebijakan yang berbasis hukum, konsultasi dengan pihak yang berkompeten, dan penerapan prinsip transparansi, dapat membantu mengurangi kemungkinan timbulnya sengketa atau pelanggaran hukum.

Di sektor pemerintahan, manajemen risiko hukum berperan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Begitu pula di sektor swasta, penerapan manajemen risiko hukum yang baik dapat menjaga kelangsungan usaha dan meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik.

Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pengambil keputusan, tentang pentingnya manajemen risiko hukum dalam pengambilan keputusan. Melalui program ini, diharapkan peserta dapat belajar bagaimana cara mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum yang mungkin timbul, serta bagaimana cara menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kebijakan yang diambil. Program ini juga bertujuan untuk memperkuat kesadaran tentang transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat meminimalkan potensi konflik hukum yang dapat merugikan pihak terkait.

Tujuan dari program pengabdian kepada Masyarakat ini, yaitu untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat mengenai pentingnya manajemen risiko hukum dalam pengambilan keputusan. Memberikan Keterampilan Praktis kepada peserta untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum dalam pengambilan keputusan di sektor publik dan swasta. Mendorong Penerapan Prinsip Tata Kelola yang Baik dalam pengambilan keputusan untuk meminimalkan potensi sengketa hukum. Meningkatkan Kesadaran akan pentingnya transparansi dan

akuntabilitas dalam setiap keputusan yang diambil oleh pengambil keputusan.

Dengan meningkatkan pemahaman ini, program ini bertujuan untuk menciptakan pengambil keputusan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab, yang memperhatikan aspek hukum dalam setiap keputusan yang mereka buat.

## METODE

Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Manajemen Risiko Hukum dalam Pengambilan Keputusan. Untuk mengukur tingkat pemahaman peserta, dilakukan survei melalui pre-test dan post-test. Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan materi dan mengukur perubahan pemahaman mereka setelah materi disampaikan oleh narasumber.

Berdasarkan hasil pre-test, materi program disusun dengan fokus pada beberapa tema utama, seperti Konsep dasar manajemen risiko hukum, Pengidentifikasian dan penilaian risiko hukum dalam pengambilan Keputusan, Langkah-langkah mitigasi risiko hukum dalam kebijakan publik dan bisnis dan Studi kasus mengenai penerapan manajemen risiko hukum yang efektif. Materi juga mencakup studi kasus.

Program dimulai dengan sambutan oleh Bapak Habullah, S.H., M.H. CIIQA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, serta Bapak Dr. Armansyah, S.H., M.H. selaku dosen tetap STIH Adhyaksa dan narasumber utama dalam kegiatan ini. Dalam sesi pembukaan, tujuan dan manfaat program pengabdian kepada masyarakat dijelaskan kepada peserta dengan harapan agar mereka memahami pentingnya Manajemen Risiko Hukum dalam Pengambilan Keputusan.

Sesi utama program ini adalah pemaparan materi mengenai pentingnya Manajemen Risiko Hukum dalam Pengambilan Keputusan. Bapak Dr.

Armansyah, S.H., M.H., sebagai narasumber, akan menyampaikan materi terkait Manajemen Risiko Hukum dalam Pengambilan Keputusan. Pemaparan ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana hukum dapat dijadikan dasar dalam pengambilan Keputusan.

Setelah pemaparan materi, peserta akan mengikuti pelatihan interaktif dan simulasi yang bertujuan untuk mengaplikasikan pemahaman mereka dalam konteks nyata. Sesi interaktif ini juga memberi kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi dengan narasumber mengenai isu-isu yang belum jelas atau yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Diskusi ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman peserta mengenai topik yang telah dibahas serta memberikan ruang bagi mereka untuk berbagi pengalaman dan perspektif.

Program diakhiri dengan sesi kesimpulan yang merangkum materi yang telah disampaikan. Pada sesi ini, peserta diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan, yang akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pre-test dan post-test yang dilakukan kepada peserta, terdapat peningkatan yang signifikan dalam pemahaman mengenai manajemen risiko hukum. Sebelum mengikuti program, sebagian besar peserta menunjukkan tingkat pemahaman yang rendah terhadap pentingnya identifikasi dan mitigasi risiko hukum dalam pengambilan keputusan. Hal ini terlihat dari skor pre-test yang menunjukkan sebagian besar peserta belum menyadari adanya potensi risiko hukum yang dapat muncul dalam pengambilan keputusan baik di sektor publik maupun swasta.



Namun, setelah mengikuti program pengabdian kepada masyarakat ini, sebagian besar peserta menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman mereka terhadap konsep manajemen risiko hukum. Melalui pemaparan materi yang jelas dan studi kasus yang relevan, peserta dapat mengerti bagaimana mengidentifikasi potensi risiko hukum yang mungkin timbul dari suatu keputusan serta cara-cara mitigasinya. Hasil post-test menunjukkan bahwa sebagian besar peserta kini menyadari pentingnya mengintegrasikan analisis risiko hukum dalam proses pengambilan keputusan mereka.



Selain itu, banyak peserta yang menyatakan bahwa mereka merasa lebih percaya diri dalam memitigasi potensi masalah hukum dalam kebijakan yang mereka buat, baik di sektor pemerintahan maupun di dunia usaha. Keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari peningkatan skor tes, tetapi juga dari feedback positif yang diberikan peserta terkait relevansi materi dan penerapannya dalam konteks pekerjaan mereka sehari-hari.



Meskipun program ini berhasil mencapai tujuan utamanya, tantangan yang signifikan tetap muncul, terutama berkaitan dengan perbedaan tingkat pengetahuan peserta mengenai risiko hukum. Beberapa peserta yang tidak memiliki latar belakang hukum mengalami kesulitan dalam memahami istilah-istilah hukum teknis dan konsep-konsep yang lebih mendalam dalam manajemen risiko hukum. Oleh karena itu, penyusunan materi yang lebih sederhana dan mudah dipahami menjadi sangat penting.

Selain itu, tantangan lain adalah rendahnya pengetahuan praktis tentang bagaimana risiko hukum bisa mempengaruhi keputusan dalam dunia nyata. Banyak peserta yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai cara-cara mitigasi risiko hukum dalam konteks kebijakan atau pengambilan keputusan organisasi, baik di sektor pemerintahan maupun bisnis.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, materi program disusun sedemikian rupa agar mudah dipahami oleh peserta dengan berbagai latar belakang. Penyederhanaan materi dilakukan dengan menyajikan konsep-konsep dasar manajemen risiko hukum dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, diikuti dengan contoh nyata dan studi kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Studi kasus ini mencakup situasi-situasi yang sering terjadi di lingkungan pemerintahan dan sektor swasta, yang mengharuskan peserta untuk menganalisis dan mengidentifikasi potensi risiko hukum serta cara-cara mitigasinya.



Selain itu, program ini mengutamakan metode interaktif, seperti diskusi kelompok dan tanya jawab, untuk memastikan bahwa peserta dapat mengungkapkan pemahaman mereka dan menyelesaikan kebingungannya. Dengan cara ini, peserta diberi kesempatan untuk langsung berinteraksi dengan narasumber dan mengkaji berbagai contoh yang relevan. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta.

## KESIMPULAN

Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai manajemen risiko hukum dalam pengambilan keputusan. Peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta terlihat dari hasil pre-test dan post-test, di mana peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap identifikasi dan mitigasi risiko hukum setelah mengikuti program. Meskipun tantangan dalam hal perbedaan tingkat pengetahuan tetap ada, solusi yang diterapkan, seperti penyederhanaan materi dan penggunaan studi kasus yang relevan, berhasil membuat peserta lebih mudah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan peningkatan pemahaman ini, diharapkan para peserta dapat lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan dan mempertimbangkan aspek hukum yang relevan untuk meminimalkan potensi masalah hukum yang mungkin timbul. Program ini juga berhasil mendorong penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) dan transparansi dalam setiap keputusan yang diambil, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Untuk

kedepannya, diharapkan program seperti ini dapat dilanjutkan dan diperluas untuk menjangkau lebih banyak kalangan masyarakat, guna menciptakan budaya pengambilan keputusan yang lebih cermat dan bertanggung jawab secara hukum.

#### REFERENSI

1. Mulyadi, E. (2017). *Manajemen Risiko dalam Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Penerbit X.
2. Lestari, S. (2021). Pengendalian Risiko Hukum dalam Pengambilan Keputusan Pemerintah. *Jurnal Hukum dan Tata Pemerintahan*, 12(2), 45-60.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2020). *Laporan Tahunan Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: KPK.
4. Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press.



Sekolah Tinggi Ilmu Hukum  
ADHYAKSA